

IDENTIFIKASI MASALAH KEKUMUHAN KAMPUNG TEPIAN SUNGAI STUDI KASUS KELURAHAN BANSIR LAUT, SUNGAI KAPUAS, KOTA PONTIANAK

Yovi Bianca¹⁾, Suryono Herlambang^{2)*}, Regina Suryadjaja³⁾

¹⁾Program Studi S1 PWK, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, Jakarta, yovibianca@gmail.com

^{2)*} Program Studi S1 PWK, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, Jakarta, suryonoh@ft.untar.ac.id

^{3)*} Program Studi S1 PWK, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, Jakarta, reginas@ft.untar.ac.id

*Penulis Korespondensi: suryonoh@ft.untar.ac.id

Masuk: 29-06-2024, revisi: 05-10-2024, diterima untuk diterbitkan: 10-10-2024

Abstrak

Orientasi kehidupan dan permukiman masyarakat kota Pontianak cenderung berkembang di daerah daratan sehingga permukiman yang ada pada tepian dan badan air Sungai Kapuas tidak mendapatkan perhatian pengelolaan sumber daya air yang baik. Secara eksisting, kondisi permukiman di tepian Sungai Kapuas sangatlah memprihatinkan. Terdapat banyak kampung yang tumbuh ditepian Sungai Kapuas. Kampung – kampung tersebut dinilai tidak layak huni karena munculnya masalah permukiman kumuh seperti ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas struktur bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat teknis dan tidak melayani permukiman, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tidak memadai bagi penduduknya. Salah satunya adalah Kampung Caping dan Kampung Tudong. Walaupun sudah ada upaya - upaya penataan kawasan kumuh telah direalisasikan oleh program-program pemerintah, namun secara eksisting selain citra kawasan permukiman tepian sungai Kampung Caping dan Kampung Tudong yang belum bisa memberikan keindahan dan penghijauan yang lestari pada fisik lingkungannya, kawasan permukiman juga belum berkapabilitas dalam pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana lingkungan untuk mendukung aktivitas masyarakat yang tinggal di dalam kampung tepian Sungai Kapuas. Maka, penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat mengidentifikasi masalah kekumuhan yang terjadi di Kampung Caping dan Kampung Tudong secara eksisting. Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif, analisis kondisi eksisting, dan analisis standar regulasi sesuai ketentuan dari peraturan menteri dan standar nasional.

Kata kunci: permukiman kumuh; sungai kapuas; tepian sungai

Abstract

Development in Pontianak City tends to focus on land areas neglecting riverside communities in terms of proper water resource management. The living conditions in these communities, particularly those along the Kapuas River banks, are concerning. These villages are considered uninhabitable due to the emergence of slum organizational problems such as building irregularities, high levels of building density, the quality of building structures, environmental facilities and infrastructure that do not meet technical requirements and do not serve the organization, as well as public facilities and social facilities that do not affordable for its residents. One of them is Caping Village and Tudong Village. Even though there have been efforts to organize slum areas that have been realized by government programs, apart from the image of the organization area on the banks of the river in Kampung Caping and Kampung Tudong which has not been able to provide beauty and sustainable greening to its physical environment, the organization area also does not have the capability to providing the need for environmental infrastructure to support the activities of people living in villages on the banks of the Kapuas River. Therefore, this research was carried out with the hope of identifying the existing slum problems that occur in Kampung Caping and Kampung Tudong. This research will be carried out using descriptive methods, analysis of existing conditions, and analysis of regulatory standards in accordance with the provisions of ministerial regulations and national standards.

Keywords: kapuas river; riverside; slum area

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota Pontianak sudah tumbuh dan terbentuk dari muara Sungai Kapuas. Kota Pontianak sendiri dilintasi sebanyak 61 sungai dan parit yang masih dimanfaatkan sebagian masyarakat kota untuk kebutuhan sehari - hari dan sebagai penunjang sarana dan prasarana kota. Sungai dan kanal – kanal tersebut tidak hanya berperan sebagai penghidupan kawasan permukiman, tapi juga membentuk karakteristik kota Pontianak secara fisik, ekologi, budaya, dan ekonomi.

Orientasi kehidupan dan permukiman masyarakat kota Pontianak cenderung berkembang di daerah daratan sehingga permukiman yang ada pada tepian dan badan air Sungai Kapuas tidak mendapatkan perhatian pengelolaan sumber daya air yang baik. Secara eksisting, kondisi permukiman di tepian Sungai Kapuas sangatlah memprihatinkan. Terdapat banyak kampung yang tumbuh ditepian Sungai Kapuas dinilai tidak layak huni karena masalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat teknis. Padahal kawasan tepian sungai dapat menjadi aset kota Pontianak yang berharga, namun kini hanya menjadi citra buruk bagi kota.



Gambar 1. Kondisi Eksisting Kampung di Kelurahan Bansir Laut
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Selain citra kawasan permukiman tepian sungai Kampung Caping dan Kampung Tudong belum bisa memberikan keindahan dan penghijauan yang lestari pada fisik lingkungannya, kawasan permukiman juga belum berkapabilitas dalam pemenuhan kebutuhan akan perilaku dan aktivitas masyarakat di tepian Sungai Kapuas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai karakteristik kampung kumuh di tepian Sungai Kapuas dengan harapan dapat menghasilkan berbagai alternatif yang mungkin dapat dijadikan sebuah ide kreatif maupun konsep dalam menata kawasan permukiman kumuh di tepian sungai.

Rumusan Permasalahan

Kekumuhan pada kampung dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas hidup penduduknya yang meliputi kualitas kesehatan, tingkat ekonomi, sosial, pendidikan, dan keamanan masyarakat. Dengan perumusan regulasi, kebijakan, dan standarisasi yang komprehensif dapat dijadikan tolak ukur untuk mengidentifikasi masalah kekumuhan pada Kampung Caping dan Kampung Tudong.

Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah permukiman kumuh di tepi Sungai Kapuas Kampung Caping dan Kampung Tudong; mengidentifikasi aktivitas masyarakat yang tinggal di kawasan kampung kumuh di tepian Sungai Kapuas.

2. KAJIAN LITERATUR

Permukiman Kumuh Di Tepi Sungai

Permukiman kumuh tercipta dari meningkatnya jumlah penduduk serta pembangunan dan penambahan pusat-pusat aktivitas perkotaan baru yang memicu pertumbuhan wilayah secara langsung juga meningkatkan kebutuhan akan perumahan dan lahan sehingga mengakibatkan pemanfaatan lahan secara intensif dengan kepadatan bangunan dan penduduk yang tinggi. Terlebih lagi didorong oleh faktor lahan yang relatif murah yang biasanya dapat dijumpai di daerah pinggiran kota. Kawasan permukiman kumuh umumnya dapat ditemukan di kota - kota besar yang mayoritas tumbuh baik di pusat kota, pusat perdagangan dan jasa, kawasan industri, di tepi atau sempadan sungai dan pantai.

Permukiman kumuh di tepi sungai adalah permukiman kumuh yang umumnya tumbuh dan berkembang di zona tepi air atau sempadan sungai. Permukiman kumuh dapat dikatakan ilegal karena umumnya pengembangannya berada atau melewati Garis Sempadan Sungai (GSS). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011, sungai memiliki peran penting bagi fungsinya terhadap kehidupan manusia dan alam. Sungai dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi dan lain sebagainya. Demikian pula fungsi sungai bagi alam sebagai pendukung utama kehidupan flora dan fauna. Oleh karena itu, pemeliharaan sungai sangat penting terutama sungai dekat dengan permukiman agar sungai dapat menjalankan fungsinya secara baik dan berkelanjutan.

Kawasan permukiman di tepi sungai akan mengalami penurunan kualitas lingkungan apabila permasalahan seperti letak bangunan yang tidak teratur, utilitas yang tidak berfungsi dengan baik, fasilitas pelayanan yang minim, disertai kebiasaan dan perilaku penduduk yang kurang baik tidak ditangani. Apabila kondisi tersebut tidak mendapat perhatian, maka dapat merusak tidak hanya dari segi tata ruang tapi juga kesehatan lingkungan alam air dan dapat mengakibatkan titik area kumuh menjadi semakin bertambah. Oleh karena itu, harus ada suatu kebijakan dan standar nasional dari pemerintah sebagai pedoman identifikasi masalah kekumuhan pada suatu kawasan permukiman.

Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018

Peraturan Menteri berfungsi sebagai pedoman untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Adapun empat kriteria atau klasifikasi kekumuhan pada fisik kawasan agar dapat diidentifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai berikut.

Tabel 1. Indikator Kekumuhan Permukiman

No.	Kriteria	Indikator
1.	Bangunan Gedung	<p>Ketidakteraturan Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan hunian tidak memiliki akses langsung ke jalan dengan lebar $\geq 1,5$ meter ▪ Posisi muka bangunan hunian tidak menghadap ke jalan yang lebarnya $\geq 1,5$ meter ▪ Bangunan hunian menghadap langsung ke sungai/ laut/ rawa/ danau atau berada di atas sungai/ laut/ rawa/ danau

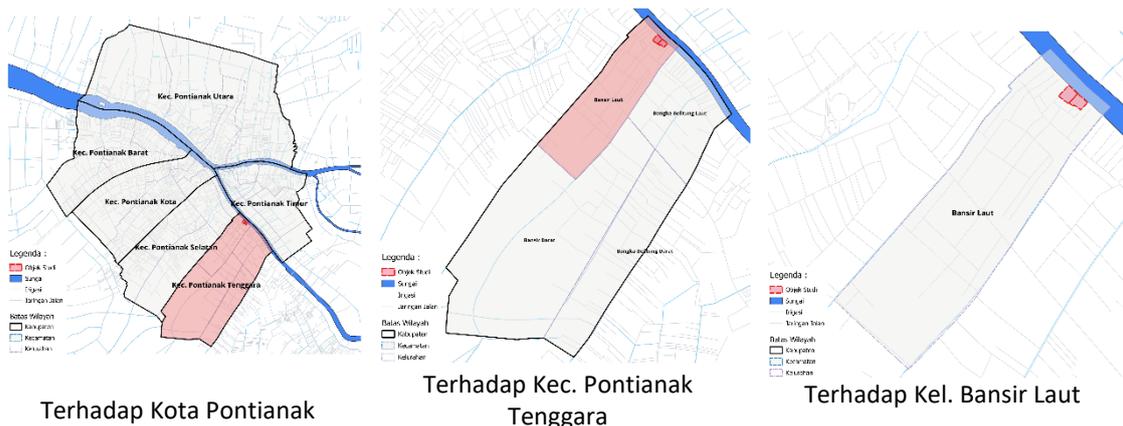
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan hunian berada di atas sempadan sungai/ laut/ rawa/ danau ▪ Bangunan hunian berada di daerah buangan limbah pabrik ▪ Bangunan hunian berada di bawah jalur listrik tegangan tinggi (SUTET)
	Tingkat Kepadatan Bangunan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Area/ Lingkungan/ RT memiliki kepadatan > 200 – 250 unit/Ha
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Bangunan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lantai per kapita $\geq 7,2$ m² ▪ Kondisi atap terlalu bocor ▪ Kondisi dinding terlalu rusak ▪ Jenis lantai terlalu adalah tanah
2.	Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman
3.	Penyediaan Air Bersih	Ketersediaan Akses Aman Air Bersih	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air bersih yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa
	Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih		Kebutuhan air bersih masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari
4.	Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga 2. Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan 3. Sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan 4. Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak Sesuai Standar Teknis		Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pewadahan dan pemilahan domestik 2. Pengumpulan lingkungan 3. Pengangkutan lingkungan 4. Pengelolaan lingkungan

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018

3. METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Objek studi dikonsentrasikan pada Kampung Caping dan Kampung Tudong yang berbatasan langsung dengan Sungai Kapuas. Penelitian ini didasari oleh legalitas permukiman kumuh menurut surat ketetapan kumuh Walikota Pontianak. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk memaksimalkan penelitian ini kurang lebih selama 6 bulan. Penelitian akan dimulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.



Gambar 2. Lokasi Objek Studi
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2024

Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data primer, penulis akan melakukan pendekatan kepada individu-individu atau pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan objek studi; Adapun teknik yang akan diterapkan dalam pengumpulan data primer, antara lain observasi dan wawancara; Unsur-unsur yang dikaji dalam melakukan pengumpulan data primer meliputi kondisi fisik kawasan seperti bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air bersih, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran; Penggunaan lahan juga akan dianalisis, mencakup area hunian, area komersial, dan ruang terbuka publik (RPTRA, TPU, lahan parkir); Selain itu, kesempatan kerja dan mata pencaharian penduduk, termasuk jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan penduduk setempat, akan menjadi fokus kajian.

Dalam memperoleh data sekunder, penulis akan mengumpulkan data melalui sumber yang sudah ada dari masa lampau terkait kawasan permukiman kumuh di tepi air. Adapun teknik yang akan diterapkan dalam pengumpulan data sekunder, antara lain instansional, studi literatur dan media. Adapun unsur-unsur yang dikaji dalam melakukan pengumpulan data primer meliputi: dokumen rencana tata ruang yang mencakup kebijakan dan peraturan terkait permukiman kumuh, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta penetapan kawasan strategis; regulasi spasial seperti RTRW, RDTR, RTBL, UDGL, zonasi, dan status tanah; kependudukan yang mencakup jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok usia serta kepadatan penduduk; sarana dan prasarana yang mencakup infrastruktur dan jumlah sarana dan prasarana; aspek sosial yang berkaitan dengan tingkat pendidikan penduduk; serta aspek ekonomi yang mencakup jumlah penduduk usia produktif, mata pencaharian atau jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan penduduk.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini meliputi: analisis deskriptif yang memanfaatkan kondisi eksisting serta pengalaman sebagai sumber pengetahuan; analisis

kondisi eksisting yang merupakan kegiatan peninjauan ke lokasi objek studi untuk memperoleh data akurat dan relevan mengenai keadaan aspek fisik maupun non-fisik kampung secara fakta; dan analisis standar yang mengambil beberapa standardisasi yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai infrastruktur jaringan fasilitas lingkungan yang dijabarkan secara teknis, sehingga penelitian ini memiliki tolak ukur dalam mengidentifikasi nilai kekumuhan pada Kampung Caping dan Kampung Tudong.

4. DISKUSI DAN HASIL

Profile Objek Studi : Kampung Caping

Kampung Caping merupakan salah satu kampung di Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut delineasi RT/RW Kelurahan Bansir Laut, Kampung Caping terletak pada RT03/RW03. Permukiman kampung terletak tepat pada tepian Sungai Kapuas, yang mana merupakan sungai terpanjang di Indonesia.

Kawasan Kampung Caping memiliki luas wilayah sebesar 1,37 Ha dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 71 kepala keluarga sehingga kepadatannya mencapai 279 jiwa/ha. Berikut merupakan batas – batas wilayah Kampung Caping. Sebelah utara: Sungai Kapuas; sebelah selatan: Kelurahan Bansir Darat; sebelah timur: Kampung Bangka; sebelah barat: Kampung Tudong.



Gambar 3. Peta Lokasi Kampung Caping
Sumber : Google Earth, Hasil Olahhan Penulis, 2024

Area kawasan Kampung Caping termasuk ke dalam kategori permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota Pontianak di dalam Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 1063.1/D-PRKP/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh.

Profile Objek Studi: Kampung Tudong

Kampung Tudong terletak di sebelah barat Kampung Caping. Menurut delineasi RT/RW Kelurahan Bansir Laut, Kampung Tudong terletak pada RT 03/RW 04. Permukiman Kampung Tudong juga berdiri di atas air Sungai Kapuas. Kawasan Kampung Tudong memiliki luas wilayah sebesar 1,52 Ha dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 74 kepala keluarga sehingga kepadatannya mencapai 250 jiwa/ha. Berikut merupakan batas – batas wilayah Kampung Tudong. Sebelah utara: Sungai Kapuas; sebelah selatan: Kelurahan Bansir Darat; sebelah timur: Kampung Caping; sebelah barat: Kampung Bansir.



Gambar 4. Peta Lokasi Kampung Tudong
Sumber: Google Earth, Hasil Olahan Penulis, 2024

Area kawasan Kampung Tudong juga termasuk ke dalam kategori permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota Pontianak di dalam Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 1063.1/D-PRKP/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh.

Analisis Kekumuhan

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang paling mempengaruhi kondisi fisik kawasan yang dialami Kampung Caping dan Kampung Tudong hingga menyebabkan kekumuhan, yaitu masalah pada bangunan gedung, prasarana jalan lingkungan, penyediaan air bersih, dan pengelolaan persampahan. Kriteria dan klasifikasi keempat masalah akan dinilai dari kriteria kekumuhan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2018 dan Standar Nasional Indonesia.

Bangunan Gedung

Berikut merupakan kriteria kekumuhan bangunan gedung menurut Peraturan Menteri PUPR dan persebaran hunian yang tidak teratur.

Tabel 2. Kriteria Kekumuhan Permukiman Menurut Bangunan Gedung

No	Kriteria	Indikator
1	Ketidakteraturan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan hunian tidak memiliki akses langsung ke jalan dengan lebar $\geq 1,5$ meter - Posisi muka bangunan hunian tidak menghadap ke jalan yang lebarnya $\geq 1,5$ meter - Bangunan hunian menghadap langsung ke sungai/ laut/ rawa/ danau atau berada di atas sungai/ laut/ rawa/ danau - Bangunan hunian berada di atas sempadan sungai/ laut/ rawa/ danau - Bangunan hunian berada di daerah buangan limbah pabrik - Bangunan hunian berada di bawah jalur listrik tegangan tinggi (SUTET)
2	Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Area/ Lingkungan/ RT memiliki kepadatan $> 200 - 250$ unit per Ha.
3	Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat	<ul style="list-style-type: none"> - Luas lantai per kapita $\geq 7,2$ meter² - Kondisi atap terluas bocor - Kondisi dinding terluas rusak - Jenis lantai terluas adalah tanah

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14/PRT/M/2018



Gambar 5. Kondisi Eksisting Bangunan Gedung Kampung Sumber :
Dokumentasi Penulis, 2024

Terlihat bahwa hunian memiliki pondasi yang tidak lagi kokoh, selain itu bangunan hunian juga tidak menghadap dan memiliki akses langsung ke jalan dengan lebar 1,5 meter, karena faktanya permukiman kampung belum memiliki jaringan struktur jalan sesuai teknis (pembahasan ada pada sub bab analisis jaringan jalan lingkungan). Bangunan hunian pada permukiman kampung sangat padat dan saling berhimpitan yang kemudian hal ini pun menimbulkan masalah tingkat kepadatan bangunan. Maka, upaya penataan dan pengembangan pada bangunan gedung permukiman perlu dilakukan.

Jalan Lingkungan

Berikut merupakan kriteria kekumuhan jalan lingkungan menurut Peraturan Menteri PUPR sebagai acuan.

Tabel 3. Kriteria Kekumuhan Permukiman Menurut Jalan Lingkungan

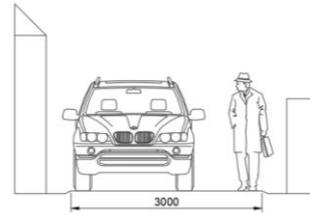
No	Kriteria	Indikator
1	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	- Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis
2	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	- Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2018

Faktanya, prasarana jaringan jalan lingkungan pada Kampung Caping dan Kampung Tudong belum memenuhi standar teknis diatas. Berikut merupakan kondisi eksisting jalan lingkungan pada kawasan kampung.



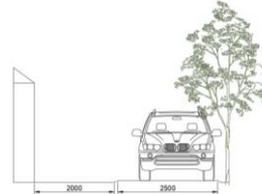
Gg. Haji Ali



Tampak Depan



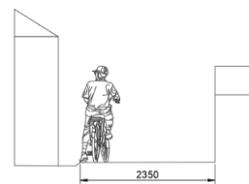
Gg. Haji Salmah



Tampak Depan



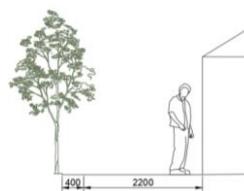
Gg. Mendawai Tengah



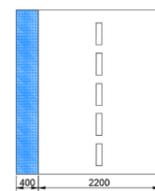
Tampak Depan



Gg. Mukti



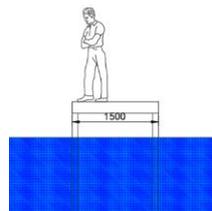
Tampak Depan



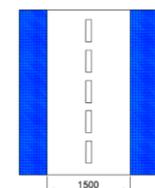
Tampak Atas



Jalan Gertak Kampung



Tampak Depan



Tampak Atas

Gambar 7. Potongan Jalan Lingkungan Kawasan Kampung (meter)

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2024



Gambar 8. Kondisi Eksisting Jalan Lingkungan Kawasan Kampung

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Prasarana jaringan jalan kampung masih sangat sulit untuk menjangkau kawasan kampung. Selain itu, infrastruktur jalan pada kampung tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang mana sebagian kondisi fisik jalan permukaannya sudah rusak dan tidak melayani permukiman. Jalan gertak kampung yang mana adalah jalan utama dengan intensitas mobilitas paling tinggi di kawasan kampung hanya memiliki lebar 1,5 meter dan belum memiliki ralling pembatas sehingga tidak aman bagi pengguna jalan sehingga tidak dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat kampung.

Penyediaan Air Bersih

Berikut merupakan kriteria kekumuhan menurut penyediaan air bersih berdasarkan Peraturan Menteri PUPR sebagai acuan.

Tabel 4. Kriteria Kekumuhan Permukiman Menurut Penyediaan Air Bersih

No.	Kriteria	Indikator	
1.	Penyediaan Air Bersih	Ketersediaan Akses Aman Air Bersih	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air bersih yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih	Kebutuhan air bersih masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018



Gambar 9. Permasalahan Air Bersih Kawasan Kampung
Sumber: Program KOTAKU & Hasil Olahan Penulis, 2024

Faktanya, secara eksisting tingkat pelayanan air bersih di kawasan Kampung Caping dan Kampung Tudong tergolong masih sangat rendah dan tidak memenuhi standar teknis karena minimnya cakupan layanan PDAM dari pemerintah perkotaan. Akibatnya untuk mengantisipasi kekurangan air bersih penduduk Kampung Caping dan Kampung Tudong menampung air hujan untuk dimanfaatkan sebagai air minum dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Walaupun demikian, penduduk yang selalu mengandalkan air hujan sebagai air minum akan mendapatkan masalah kekurangan air bersih mengingat kondisi musim yang berubah – ubah dapat mempengaruhi jumlah curah hujan. Misalnya seperti disaat musim kemarau tiba, kadar garam pada air sangatlah tinggi.

Pengelolaan Persampahan

Berikut adalah ketentuan dan persyaratan teknis yang telah diatur oleh Standar Nasional Indonesia mengenai jaringan air bersih dan kriteria kekumuhan menurut Peraturan Menteri PUPR sebagai acuan.

No	Kriteria	Indikator
1	Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu : 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik tau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan
2	Sistem pengelolaan persampahan tidak memnuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memnuhi persyaratan sebagai berikut; 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengelolaan lingkungan

Gambar 10. Kriteria Kekumuhan Menurut Prasarana Persampahan

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14/PRT/M/2018

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan
	Sarana pelengkap	Status	Dimensi	
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi	-	--
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m
	Bak sampah kecil		6 m ³	
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		12 m ³	
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS/TPA lokal	-	Mobil mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		25 m ³	
Kota (> 480.000 jiwa)	Bak sampah akhir	TPA	-	--
	Tempat daur ulang sampah		-	

Gambar 11. Kebutuhan Prasarana Persampahan

Sumber: SNI 03-1733-2004, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Faktanya, secara eksisting kawasan kampung belum memiliki sarana persampahan yang sesuai dengan standar teknis. Permukiman kampung belum memiliki tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai. Sehingga menimbulkan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan disekitar lingkungan rumah dan alam air. Tidak jarang juga ada warga yang mengumpulkan sampahnya kemudian dibakar di sekitar halaman rumah yang mana dapat menimbulkan resiko kebakaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Permukiman kumuh tepi sungai merupakan kawasan permukiman yang tumbuh dan berkembang di zona tepi air atau sempadan sungai. Keberadaannya dipicu oleh beberapa faktor seperti peningkatan jumlah penduduk, pembangunan dan penambahan pusat – pusat aktivitas perkotaan baru, dan ketersediaan lahan yang cenderung murah. Persoalan pada permukiman kumuh di tepi sungai dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga kerusakan tata ruang.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan standar nasional dari pemerintah untuk mengidentifikasi masalah kekumuhan agar dapat menjadi tolak ukur membangun sistem yang efektif untuk mengidentifikasi dan memetakan kawasan kumuh di tepi sungai. Kemudian merumuskan strategi dan program untuk mencegah perluasan permukiman kumuh serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian permukiman kumuh di tepi sungai pada Kampung Caping dan Kampung Tudong di Kelurahan Bansir Laut, Kota Pontianak, permukiman memiliki empat indikator masalah kekumuhan, yaitu: pertama, kondisi dan kualitas bangunan hunian yang memiliki pondasi tidak kokoh; kepadatan bangunan yang tinggi menyebabkan masalah tingkat kepadatan; kedua, jaringan jalan lingkungan dengan kualitas infrastruktur yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis, dimana sebagian kondisi fisik jalan sudah rusak dan tidak melayani permukiman; jalan gertak kampung sebagai jalan utama hanya memiliki lebar 1,5 meter dan tidak aman bagi pengguna jalan; ketiga, penyediaan air bersih yang tidak memadai mengakibatkan penduduk menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari; dan keempat, prasarana serta sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, tanpa tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai, sehingga menimbulkan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan di lingkungan rumah.

Maka, dari hasil penelitian diatas, diharapkan kampung mendapatkan tindakan penataan kawasan dan revitalisasi terkait masalah bangunan hunian, infrastruktur jalan lingkungan, penyediaan air bersih, dan sistem pengelolaan persampahan untuk menciptakan lingkungan hunian yang lestari dan layak tinggal bagi penduduk Kampung Caping dan Kampung Tudong.

Saran

Kampung Caping dan Kampung Tudong yang berbatasan dengan Sungai Kapuas memiliki karakteristik dalam segi sejarah dan budaya yang berpotensi mendorong perkembangan Kota Pontianak itu sendiri. Kawasan kampung dapat dimanfaatkan menjadi destinasi wisata budaya, lebih dari itu kelebihan Sungai Kapuas yang merupakan bagian elemen fisik Kota Pontianak dapat dikembangkan menjadi kota tepi air (*waterfront city*) yang layak serta dijadikan suatu kawasan yang *liveable* bagi masyarakat setempat. Selain itu, terdapat banyak aktivitas yang dapat memanfaatkan alam tepi air untuk dinikmati oleh penduduk dan dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal ini pula yang menjadi menarik perhatian pemerintah untuk melibatkan Kelurahan Bansir Laut untuk masuk ke dalam Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk penanganan permukiman kumuh skala Kabupaten/Kota di Indonesia.

Pengembangan di kawasan tepi Sungai Kapuas ini tidak hanya semata-mata memanfaatkan potensi yang dimilikinya tetapi juga penting mempertimbangkan dampak pengembangan dan permasalahan yang berpotensi timbul pada kawasan di masa yang akan datang dan mencegah lahirnya permasalahan kekumuhan yang baru. Untuk menghindari terjadinya konflik kegiatan dan pemanfaatan lahan yang menyimpang, maka perlu ada pengaturan dan penataan pada kawasan dengan bijak.

REFERENSI

- Amintharso, Z. T. (2015). *Penataan Pemukiman Kumuh di Kawasan Pesisir Berbasis Masyarakat Studi Kasus Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo*(Doctoral dissertation, ITN MALANG).
- Christiani, C., Tedjo, P., & Martono, B. (2014). Analisis dampak kepadatan penduduk terhadap kualitas hidup masyarakat provinsi jawa tengah. *Serat acitya*, 3(1), 102.
- Fitri, D. A. (2021). Faktor-faktor penyebab munculnya permukiman kumuh daerah perkotaan di indonesia (sebuah studi literatur). *Jurnal Swara Bhumi*, 1(1), 1-9.

- Herlambang, S., Deliyanto, B., Susilowati, I., Suryadjaya, R., & Elysia, V. (2015). Perencanaan Tapak.
- Muhammad, B. A., & Sulistyarso, H. (2016). Arahan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Kecamatan Kenjeran dengan Pendekatan Eco-Settlements. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2), C124-C128.
- Pribadi, O. S. (2021). *Pengertian dasar tentang hunian dan kawasan permukiman serta kriteria dan konsep desain hunian dan kawasan*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.
- Putro & Nurhamsyah, M. (2014). Pola Permukiman Tepian Air (Studi Kasus: Desa Sepuk Laut, Punggur Besar dan Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya). *Jurnal Penelitian*, 2(1), 65-75.
- Sastika, A., & Yasir, A. (2017). Karakteristik Permukiman Di Tepian Sungai (Studi Kasus: Permukiman Di Tepian Sungai Musi). *Jurnal Penelitian*, 8(2), 83-88.
- Sastrawati, I. (2003). Prinsip Perancangan Kawasan Tepi Air (Kasus Kawasan Tanjung Bunga). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 14(3), 95-117.
- Syafitri, R. (2017). *Analisis Persebaran Kualitas Permukiman Kumuh Di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

